



ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING POVERTY IN THE PROVINCE OF THE BANGKA BELITUNG ISLANDS

Anggi Aprillia*¹

Rulyanti Susi Wardhani² 

M. Faisal Akbar³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

ABSTRACT

Poverty is a condition of the inability of individuals or community groups to meet basic needs such as housing, clothing and food to ensure a certain standard of living. If a country is able to reduce the level of poverty, then the welfare of the community can be realized through the implementation of quality development. This study aims to analyze and determine the effect of economic growth, income inequality, government spending and the open unemployment rate on poverty. This research used quantitative research. The analytical tool used in this study is multiple linear regression with panel data. The results showed that partially the economic growth had a negative and significant effect on poverty, government spending had a negative and insignificant effect on poverty and income inequality and open unemployment had a positive and significant effect on poverty in the Province of the Bangka Belitung Islands. Meanwhile, the results of the simultaneous test show that overall the variables of economic growth, income inequality, government spending and the open unemployment rate have a positive and significant effect on poverty in the Province of the Bangka Belitung Islands.

Keywords: Economic Growth, Income Inequality, Government Expenditure, Unemployment Rate, Poverty

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti papan, sandang dan pangan untuk menjamin standar hidup tertentu. Jika suatu negara mampu menekan tingkat kemiskinan, maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:
15 Agustus 2021
Tanggal Revisi:
02 November 2021
Tanggal Diterima:
22 November 2021
Tersedia Online:
29 November 2021

*Korespondensi:
Anggi Aprillia
E-mail:
anggiaprillia63@gmail.com



Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan*
JEL: O40, O15, H53, I30

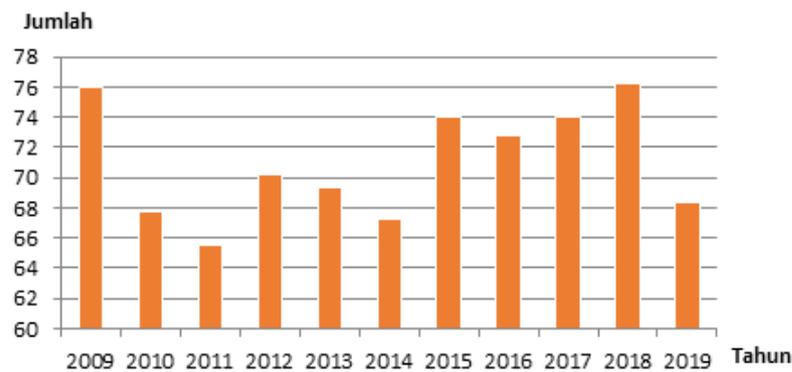
Pendahuluan

Perkembangan perekonomian suatu negara akan dihadapkan pada masalah ekonomi yang cukup berat yaitu kemiskinan. Jika suatu negara mampu menekan tingkat kemiskinan, maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas. Pembangunan merupakan peningkatan kemampuan masyarakat untuk standar hidup tertentu yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat semakin meningkat. Pembangunan ekonomi juga berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penanggulangan distribusi pendapatan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya (Syahputra, 2017). Todaro dan Smith (2014) menyatakan bahwa kemiskinan akan semakin meningkat selama distribusi pendapatan belum merata, sehingga pendapatan nasional perkapita dan pertumbuhan yang dicapai akan semakin tinggi. Sebaliknya jika pendapatan nasional per kapita dan pertumbuhan relatif rendah maka kemiskinan juga akan semakin meluas. Bourguignon (2004) juga menjelaskan jika pertumbuhan yang dihasilkan diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata, maka pengurangan kemiskinan akan lebih efektif.

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti papan, sandang dan pangan baik kondisi fisik maupun ekonomi untuk menjamin standar hidup tertentu (Jacobus dkk., 2018). Kemiskinan muncul karena adanya tingkat jumlah penduduk yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial. Faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu tingkat pendidikan yang rendah, sumber daya manusia yang belum memadai, serta terbatasnya lapangan pekerjaan dan minimnya upah.

Gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010-2019. Gambar 1 jumlah penduduk miskin mengalami fluktuatif dan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 76.260 ribu jiwa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan kelompok masyarakat terhadap proses pembangunan terkait kepemilikan faktor produksi belum memadai serta kebijakan dari pemerintah masih kurang tepat dengan keahlian dari masyarakatnya, sehingga menyebabkan masyarakat belum mendapatkan hasil dari proses pembangunan tersebut (Nadhifah, 2018). Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 65.550 ribu jiwa. Penurunan mengindikasikan bahwa kesejahteraan jumlah penduduk semakin meningkat dalam standar kecukupan papan, sandang dan pangan. Dengan demikian peningkatan kinerja dari pemerintah negara di perkotaan maupun pedesaan untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu sudah sangat baik, serta meluasnya lapangan pekerjaan yang mulai merambah ke daerah pelosok-pelosok sehingga pendapatan yang didapat mulai meningkat (Nisa dkk., 2020).

Salah satu indikator dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp75,83 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp53,95 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencapai Rp50,93 juta.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

Gambar 1: Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ribu Rupiah)

Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Lapangan Usaha Konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka proses pertambahan *output* wilayah dan prospek perkembangan wilayah semakin baik, sehingga banyak juga keinginan orang untuk berinvestasi dan banyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan berdampak pada kecilnya tingkat pengangguran dan kemiskinan (Amri, 2017).

Ketimpangan pendapatan saat ini juga menjadi topik penting dalam pembangunan setiap negara. Secara teori, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tidak merata. Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi distribusi pendapatan yang belum merata antara kelompok masyarakat di suatu daerah (Permana, 2016). Fokus pembangunan saat ini tidak hanya tentang bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga agar pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan. *Gini ratio* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Maret 2019 tercatat sebagai yang terendah se-Indonesia. *Gini Ratio* yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan turun dari 0,281 pada Maret 2018 menjadi 0,269 pada Maret 2019. Semakin tinggi nilai *gini ratio* berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran. Semakin besar ketimpangan antar wilayah maka akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah (Nugroho, 2014).

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja untuk memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Misdawita, 2013). Pengeluaran pemerintah terus naik setiap tahunnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja namun juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah. Kebebasan pemerintah daerah untuk merencanakan keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah berhak mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan publik atas sarana dan prasarana umum yang diperlukan (Pratama, 2019).

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam kurun waktu dari 2010 sampai dengan 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp. 5.272.781 juta rupiah. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kemampuan penyerapan yang lebih baik. Disisi lain pemerintah dituntut untuk lebih mengalokasikan dana bagi belanja yang diperkirakan memberikan efek ganda (*multiplier*) lebih besar. Dengan demikian kecenderun-

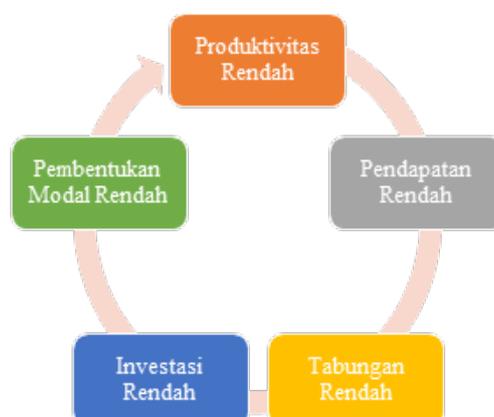
gan pemerintah untuk terus menambah porsi belanja barang dan modal nampaknya akan terus dipertahankan dimasa-masa yang akan datang (BPS Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

Persoalan kemiskinan juga dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tingkat pengangguran berkurang dan tingkat kemiskinan akan semakin rendah (Soejoto, 2011). Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang disebabkan oleh bertambahnya lapangan usaha lebih sedikit dari peningkatan jumlah pekerja. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat dan menyebabkan pendapatan rendah yang dapat memicu kemiskinan (Probosiwi, 2016). Peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan. Kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan harga produk secara keseluruhan sehingga kapasitas seluruh lapangan usaha menurun. Pengangguran terbuka dapat pula terjadi karena kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia akibat kemunduran perkembangan suatu industri.

Rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2019. TPT turun 0,3 poin dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3,65 persen. TPT di wilayah perkotaan (4,32 persen) lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan (2,90 persen). Angka TPT Bangka Belitung ini masih cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang mencapai 5,34 persen. Untuk kawasan perkotaan arus urbanisasi (migrasi) tidak dapat dihindari, karena pesatnya perkembangan penduduk di perkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup sehingga timbul pengangguran. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang sebagian besarnya tingkat pengangguran dan pendidikan relatif rendah. Adanya industri primer di pedesaan memudahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan tanpa permintaan khusus, sehingga tingkat pengangguran akan relatif lebih rendah.

Telaah Literatur

Lingkar Kemiskinan merupakan rangkaian dari pengaruh timbal balik yang menyebabkan suatu negara tetap miskin dan sulit mencapai pembangunan yang lebih tinggi (Arsyad, 2016). Lingkar setan kemiskinan pertama kali dikemukakan oleh Nurkse yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya diakibatkan oleh pembangunan dimasa lalu, tetapi juga menjadi faktor penghambat pembangunan di masa depan. Nurkse menyatakan bahwa keterbelakangan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi dan dapat dicegah melalui pendidikan yang berkualitas guna mendapatkan ilmu pengetahuan.



Sumber : Nurkse dalam Jhinghan (2000)

Gambar 2: Lingkar Kemiskinan dari Sisi Penawaran

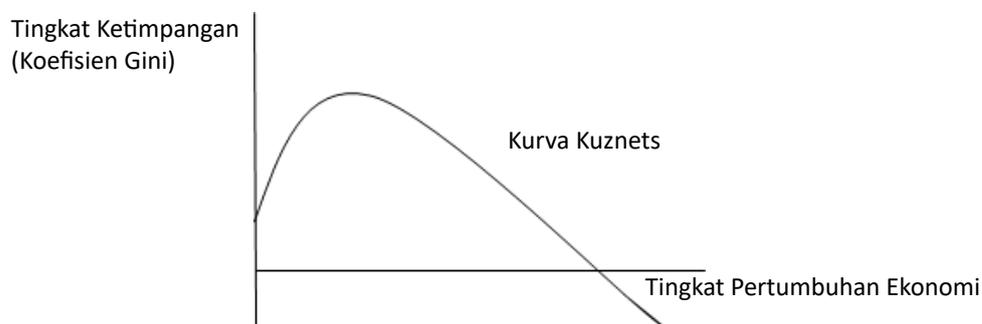
Berdasarkan gambar 2, lingkaran kemiskinan dari sisi penawaran menjelaskan jika produktivitas yang rendah dapat menyebabkan pendapatan menjadi rendah sehingga menyebabkan kemampuan seseorang untuk menabung menjadi sedikit dan berakibat pada investasi seseorang. Kemampuan investasi yang rendah akan mengakibatkan suatu negara kekurangan barang modal sehingga produktivitas akan tetap berada di posisi yang rendah (Mahendra, 2019).

Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan memiliki sifat kumulatif. Artinya jika produktivitas tenaga kerja dan pembagian kerja meningkat, maka terdapat pasar dan akumulasi yang cukup sehingga peningkatan tersebut mengakibatkan pendapatan nasional meningkat. Smith menolak adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sistem ekonomi yang diserahkan kepada penduduk sebagai pelaku perekonomian (Lestari, 2019). Sedangkan teori Harrod-Domar menjelaskan perlunya pembentukan modal (investasi) dalam pertumbuhan ekonomi. Jika pembentukan modal berlangsung, maka perekonomian akan mampu menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak. Semakin tinggi investasinya maka semakin baik perekonomian melalui kapasitas produksi yang akan meningkatkan persediaan modal (Susetyo, 2011).

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kesejahteraan sosial yang tercermin dari perbedaan pendapatan antara golongan kaya dan miskin di suatu wilayah. Pasalnya, setiap daerah memiliki kandungan sumber daya alam dan status penduduk yang berbeda, serta perbedaan produksi seperti persediaan modal yang lebih banyak yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Badriah, 2019).

Menurut Prof. Simon Kuznet, pada tahap pertama pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan semakin menurun, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan meningkat seiring dengan kesetaraan pendapatan. Karena terdapat perubahan vertikal (deret waktu) dalam distribusi pendapatan, observasi ini dikenal dengan kurva kuznet “U-terbalik”. Hal tersebut digambarkan dalam kurva kuznet yang menunjukkan adanya hubungan positif pertumbuhan pendapatan per kapita dengan kesenjangan pendapatan jangka pendek. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya berpengaruh negatif.

Gambar 4 menjelaskan jika pendapatan semakin meningkat maka tingkat distribusi pendapatan semakin merata, artinya peningkatan pendapatan tersebut akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Tahapan peningkatan dan penurunan ketimpangan pendapatan tidak bisa dihindari, namun hal tersebut bergantung pada proses pembangunan masing-masing negara.



Sumber : Todaro & Smith (2011)

Gambar 3: Kurva Kuznet

Pengeluaran pemerintah menggambarkan kebijakan pemerintah untuk membeli barang atau jasa untuk melaksanakan pengeluaran yang disediakan pemerintah (Azwar, 2016). Adolf Wagner mengatakan jika belanja pemerintah dan kegiatan pemerintah mengalami peningkatan. Teori Wagner menjelaskan bahwa jika total pendapatan meningkat, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Wagner menjelaskan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi akan mempersulit hubungan antar komunitas, sehingga kegagalan lebih cenderung mengarah pada biaya yang semakin besar. Pandangan Wagner didasarkan pada teori yang disebut (*organic theory of the state*) yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai individu yang dapat bertindak bebas dari anggota lain (Mangkoesoebroto, 2001).

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif dengan metode data panel (*pooled data*), yaitu perpaduan antara *time series* dan *cross section*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi literatur atau catatan berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan dan diperoleh secara tidak langsung dari Badan Pusat Statistik. Data dalam penelitian ini menggunakan data *time series* atau kurun waktu dari tahun 2009-2019 dan *cross section* yang terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur an 1 Kota yaitu Kota Pangkal Pinang.

Model Empiris Regresi Data Panel

Data panel merupakan perpaduan antara data *time series* dan *cross section* atau sebagian obyek dan waktu yang dikumpulkan (Kuncoro, 2012). Data *cross section* merupakan data observasi tentang subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Sedangkan data deret waktu (*time series*) adalah data observasi yang diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama sembilan tahun. Pada data panel, pengamatan dilakukan dengan beberapa subjek untuk dianalisis dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* ditunjukkan oleh :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i; i = 1, 2, \dots, N \quad (1)$$

Dimana "N" merupakan jumlah data *cross section*. Sedangkan persamaan model dengan *time series* dapat dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t; i = 1, 2, \dots, T \quad (2)$$

Dimana "T" merupakan jumlah data *time series*. Sehingga persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad (4)$$

Dalam model tersebut, Y merupakan variabel terikat sedangkan X merupakan variabel bebas. N menunjukkan banyaknya observasi sedangkan T menunjukkan banyaknya waktu yang dianalisis. Persamaan estimasi data panel sebagai berikut:

$$KM_{it} = \alpha + b_1 PE_{it} + b_2 KP_{it} + b_3 PP_{it} + b_4 TPT_{it} + e \quad (5)$$

Dimana:

- KM = Kemiskinan
- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- KP = Ketimpangan Pendapatan
- PP = Pengeluaran Pemerintah
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
- ϵ = *Error term*
- a = Konstanta
- b = Koefisien
- it = Data *time series* dan *cross section*

Tahapan Analisis

Tahapan analisis, untuk mendapatkan model terbaik dapat dilakukan pada studi kasus penelitian ini sebagai berikut :

1. Menentukan data panel yang akan digunakan dalam studi kasus penelitian.
2. Melakukan Uji *Chow Test*, Uji *Hausman Test* dan Uji *Lagrange Mutiplier (LM)* untuk memilih model yang terbaik.
3. Mengestimasi regresi data panel dengan menggunakan estimasi model yang diantaranya yaitu : Model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.
4. Melakukan Uji Hipotesis.
5. Melakukan uji asumsi klasik yang terbagi menjadi tiga, yaitu : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.
6. Melakukan verifikasi model terhadap model yang terpilih.

Hasil dan Pembahasan

Uji Chow Test

Uji ini bertujuan untuk menentukan model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model* dengan ketentuan apabila nilai *probability F* < 0,05 maka model yang terbaik adalah *fixed effect model*, untuk hasil uji *chow* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1: Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	98.386617	(6,45)	0.0000
Cross-section Chi-Square	148.258088	6.000000	0.0000

Sumber : Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa hasil uji *chow* diperoleh probabilitas pada *cross-section F* sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikan 5 persen (0,05). Nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ menunjukkan bahwa keputusan model yang digunakan dari hasil uji *chow* adalah *fixed effect model*.

Uji Hausman

Setelah melakukan uji *chow* dan telah mendapatkan hasil yaitu *fixed effect model*, selanjutnya dilakukan uji *hausman* untuk menentukan model terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas < 0,05 maka model yang terbaik adalah *fixed effect model*, untuk hasil uji *hausman* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	15.465268	4	0.0038

Sumber : Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2, hasil uji *hausman* terdapat nilai probabilitas pada *cross-section random* sebesar $0,0038 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa model yang terbaik dan sesuai digunakan dalam penelitian ini yaitu *fixed effect model*.

Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji estimasi model regresi data panel yaitu uji *chow* dan uji *hausman* yang telah dilakukan disimpulkan bahwa model terbaik dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Hasil analisis *fixed effect model* dapat lihat pada tabel berikut.

Tabel 3: Hasil Analisis Fixed Effect Model Sebelum LOG

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.58697	3.611505	8.469313	0.0000
PE	-4.610007	2.200007	-2.093373	0.0420
KP	-57.09165	8.915425	-6.403694	0.0000
PP	-0.00501	0.005782	-0.866371	0.3909
TPT	0.296693	0.097845	3.032275	0.0040
Effects Specification				
R-squared	0.953875	Mean dependent var		10.62089
Adjusted R-squared	0.943625	S.D. dependent var		3.809409
S.E. of regression	0.904481	Akaike info criterion		2.811257
Sum squared resid	36.81387	Schwarz criterion		3.209094
Log likelihood	-67.7152	Hannan-Quinn criter.		2.965498
F-statistic	93.0616	Durbin-Watson stat		2.289348
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 hasil analisis regresi data panel menggunakan *fixed effect model* diperoleh persamaan matematis yaitu :

$$KM_{it} = 30.58697 - 4.610007 PE_{it} - 57.09165 KP_{it} - 0.00501 PP_{it} + 0.296693 TPT_{it} \quad (6)$$

Persamaan regresi tersebut memiliki arti sebagai berikut :

1. Pada saat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka, nilainya 0, maka tingkat kemiskinan sebesar 30.58697 ribu jiwa.
2. Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -4.610007, artinya jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 juta, sementara nilai ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka tetap, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar -4.610007 ribu jiwa.
3. Koefisien ketimpangan pendapatan sebesar 1.879432 hal ini berarti jika ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara nilai pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka tetap,

- maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1.879432 persen.
4. Koefisien pengeluaran pemerintah sebesar -0.00501 yang artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 juta, sementara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka tetap, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.00501 ribu jiwa.
 5. Koefisien tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan. Apabila tingkat pengangguran terbuka naik 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 296,693 jiwa.

Tabel 4: Hasil Analisis *Fixed Effect Model* Setelah LOG

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.024946	0.798837	-5.038508	0.0000
PE	0.038804	0.277304	0.139932	0.8893
KP	1.879432	0.092136	20.39841	0.0000
PP	0.000880	0.002280	0.385807	0.7012
TPT	0.009351	0.075709	0.123512	0.9022
Effects Specification				
R-squared	0.979401	Mean dependent var		6.879524
Adjusted R-squared	0.975440	S.D. dependent var		0.152426
S.E. of regression	0.023888	Akaike info criterion		-4.473582
Sum squared resid	0.029673	Schwarz criterion		-4.099384
Log likelihood	151.9178	Hannan-Quinn criter.		-4.326408
F-statistic	247.2390	Durbin-Watson stat		0.639725
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien variabel ekspor diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2.093373 > 1,66864$ dengan nilai probabilitas $0,0420 < \alpha 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan arah koefisien negatif. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila pertumbuhan ekonomi menurun maka kemiskinan akan meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Prof. Simon Kuznet 1871 mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan. Pada tahap awal proses pembangunan menyebabkan kemiskinan meningkat. Namun pada tahap akhir kemiskinan mengalami penurunan secara berkelanjutan. Sehingga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan (Tambunan, 2008). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang ada pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan (Mankiw, 2014).

Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang berarti bahwa hasil penelitian sejalan dengan teori Simon Kuznet. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan karena adanya pengetatan regulasi pertambangan timah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian mengingat timah merupakan salah satu produk unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pengaruh yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan,

karena penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumiarasih (2019), Waruwu (2016), dan Wijayanto (2016) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tenaga kerja yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan yang berorientasi pada pemerataan hasil-hasil ekonomi kepada seluruh golongan masyarakat, serta dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengandalkan sektor-sektor potensial seperti sektor industri dan pertanian yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengurangi kemiskinan.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah (2018) dan Usman & Diramita (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat jika ketimpangan pendapatan belum merata maka kemiskinan akan terus meningkat. Akibatnya, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah hanya akan dinikmati oleh golongan orang kaya yang ekonominya ditunjang oleh sektor industri. Sedangkan sebagian besar masyarakat perdesaan yang ekonominya di tunjang oleh sektor pertanian akan semakin miskin, akibat dari masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan menyebabkan tingginya daya beli masyarakat. Kemudian terjadilah inflasi yang membuat harga-harga menjadi mahal, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini akan semakin memperlebar ketimpangan antar kelompok masyarakat dan akan semakin menyulitkan akses kesejahteraan bagi penduduk miskin, serta berpotensi membuat kondisi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Penyebab lain adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh penduduk miskin karena kurangnya pemerataan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana dalam mengentaskan kemiskinan.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien variabel ketimpangan pendapatan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $20.39841 > 1,66864$ dengan nilai probabilitas $0,0000 < \alpha < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 di terima dengan arah koefisien positif. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila ketimpangan pendapatan naik maka kemiskinan akan meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengaruh antara ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi penduduk sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di bawah garis kemiskinan seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Anggriawan dkk., 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Nadhifah (2018) dan Tumiarasih (2019) yang menyatakan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Angka indeks gini yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi masih belum terdistribusi secara merata. Salah satu penyebab peningkatan indeks gini adalah karena adanya pembangunan yang tidak inklusif. Hal ini dibuktikan dari peningkatan pendapatan riil masyarakat kelompok bawah jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat kelompok atas. Penyebab lainnya adalah masih terfokusnya pembangunan hanya di salah satu

sektor akan membuat sektor tersebut menjadi lebih unggul dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Alhasil akan memunculkan ketimpangan antar sektor. Kesenjangan di antara sektor-sektor ini nantinya akan membuat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat menjadi tidak merata, sebab manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai hanya akan dirasakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat yang berada di dalam sektor-sektor tertentu (sektor yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB).

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka gini ratio yang rendah meskipun jumlah penduduk miskin relatif tinggi. Gini ratio yang rendah artinya tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk dari golongan atas maupun golongan bawah hampir sama. Upaya yang dilakukan untuk pemerataan ekonomi adalah dengan memberdayakan kemampuan ekonomi lokal dari masyarakat, seperti memajukan usaha kecil guna meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah. Penyebab selanjutnya adalah rata-rata pengeluaran per kapita penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini diakibatkan karena tingginya tingkat inflasi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik serta turunnya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor informal karena turunnya harga lada dan pembatasan pertambangan timah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-0.866371 > 1,66864$ dengan nilai probabilitas $0,3909 < \alpha 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan arah koefisien negatif. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila pengeluaran pemerintah menurun maka kemiskinan akan meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut teori Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat seperti: hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi (Prasetya, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Fithri dan Kaluge \(2017\)](#) dan [Arumsari \(2017\)](#) yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena pemerintah masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Seperti halnya dengan adanya ketersediaan infrastruktur yang menandai yang merupakan dampak positif dari peningkatan belanja modal pemerintah akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh [Izzati](#)

(2018) dan Khamilah (2018) yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin besar pengeluaran pemerintah, maka tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Disisi lain, kemiskinan adalah kemampuan masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan dari taraf kebutuhan hidup mereka. Seperti halnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan, maka disinilah peran pemerintah melalui pengeluarannya dapat memberikan jalan berupa pelayan umum yang lebih mudah kepada masyarakat miskin.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.032275 > 1,66864$ dengan nilai probabilitas $0,0040 < \alpha 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan arah koefisien positif. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat maka kemiskinan akan meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengangguran dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang cukup erat. Sesuai dengan hasil pada penelitian ini bahwa tingginya tingkat pengangguran akan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini didasarkan pada suatu kondisi masyarakat yang menganggur tidak memiliki penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Probosiwi, 2018). Rendahnya pendapatan menjadi penyebab seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin. Wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi pula. Untuk itu, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah adalah dengan cara meningkatkan peluang kerja, meningkatkan upah minimum, memperbaiki kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tingkat pengangguran berangsur-angsur akan menurun, dan berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istifaiyah (2015), Putra (2018), dan Zurisdah (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, jumlah penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permintaannya, sehingga jumlah angkatan kerja yang ada tidak dapat terserap seluruhnya pada lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya jumlah pengangguran semakin bertambah. Meningkatnya jumlah pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan upah minimum, dan masih banyak yang lainnya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yacoub (2012), Safitri (2020), dan Saputra (2011) yang menyatakan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya meningkatnya pengangguran tidak akan menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian dengan melibatkan hampir seluruh anggota keluarga, meskipun penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, S. Y., Soelistyo, A., & Susilowati, D. (2016). Pengaruh Upah Minimum Dan Disitribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 218-231.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. 1(1).
- Arsyad, Lincolin. (2016). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE: Yogyakarta.
- Arumsari, F. P. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pendidikan, UMR dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Naskah Publikasi Progam Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-13.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2)
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Serta Faktor–Faktor Yang Mempengaruhinya. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Bourguignon, F. (2004). *The poverty-growth-inequality triangle* (No. 125). working paper.
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka*. <https://babel.bps.go.id>.
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019). *Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://babel.bps.go.id>.
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129-136.
- Izzati, N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 27-37.
- Jacobus, Elvira H. Kindangen, Paulus & Een N. Walewangko. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7).
- Jhingan M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah: D. Guritno. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khamilah, H. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2).
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP

AMP YKPN

- Kuncoro, Mudrajat. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahendra, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. 3(1)
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of economics*. Nelson Education.
- Nadhifah, Dhia. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Skripsi Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Brawijaya
- Nisa, K., Wulandari, A. & Rini L. (2020). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmu Sosial*. 15(1). April 2020
- Permana, Rizky. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 18(2)
- Probosiwi, R. (2016). Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan Unemployment and Its Influence on Poverty Level. *Jurnal PKS*, 15(2), 89-99.
- Safitri, A. (2018). Peramalan Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2018–2020 dengan Menggunakan Metode Eksponensial Smoothing.
- Saputra, W. A., & Mudakir, Y. B. (2011). *Analisis pengaruh jumlah penduduk, pdrb, ipm, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Soejoto, A. (2011). *Teori ekonomi makro*. Surabaya: Unesa University Press
- Susetyo. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Aglomerasi, Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro.
- Syahputra, Rinaldi. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 1 (2). Oktober 2017
- Tambunan, T. H. (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2014). *Economic Development*. Twelfth Edition. New Jersey.
- Usman dan Diramita. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2).
- Waruwu, S. J. A. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. *Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Yacoub, Y. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak* 8(3).